

DISINTEGRASI MORAL MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

T. Jacob*

Sejak tahun 1970-an kalangan intelektual dan akademisi sebenarnya telah memberi sinyalemen tentang adanya proses disintegrasi moral di kalangan masyarakat bangsa kita. Para pengamat memperhatikan adanya penipuan, korupsi, asintoni antara kata dan kerja, ketidakadilan, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak manusia, yang menjalar ke mana-mana serta memasuki segala bidang dan instansi, sampai ke kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pendidikan dan agama, sehingga tidak ada lagi tempat berharap bagi kebanyakan orang.

Nilai-nilai diganti ole harga-harga; dengan uang sebagian besar penegak hukum, moral dan etika dapat dikooptasi. Tidak hanya "nilai-nilai P4" yang baru 50 tahun usianya tidak dihayati mulai dari lapisan atas, melainkan juga nilai-nilai agama yang sudah ada beratus, bahkan beribu tahun, tidak diindahkan dalam praktek. Batas buruk-baik menjadi kabur, malahan bergeser ke arah buruk. Sanksi sejawat, sanksi administratif, dan sanksi hukum terkikis sedikit demi sedikit, serta sanksi agama di dunia juga dapat dipesan dan diatur.

Ketahanan nasional yang holistik hanya mengembang dan mudah sekali dikempiskan, oleh karena lemahnya ketahanan agama, ketahanan hukum, ketahanan moral, ketahanan ekonomis, dan ketahanan kultural-edukasional. Ada anggapan yang tak diucapkan, bahwa ketahanan militer dan politis sudah cukup untuk menjaga ketahanan nasional. Hasilnya dapat kita lihat sekarang. Anyaman moral hampir seluruhnya koyak dan sangat memalukan bangsa.

* Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM,
Kepala Laboratorium Bioantropologi dan
Paleoantropologi Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Moral

Menurut sebagian ahli, moral mempunyai basis biologis; ia

diperlukan untuk bertahan hidup. Ada dua pengaruh yang bekerja pada makhluk hidup, yaitu egoisma dan altruisma atau individualisma dan kolektivisme, yang kedua-duanya diperlukan untuk bertahan hidup. Altruisma ini memerlukan moral untuk mengimbangi egoisma dan sebaliknya. Bertahan hidup berlangsung pada peringkat individu, keluarga, komunitas, bangsa, ras dan spesies. Dunia Barat lebih mementingkan egoisma dan individualisma, seperti tampak dalam hak-hak manusia model Amerika yang etnosentris Barat, padahal hak-hak manusia harus dilihat dari perspektif transetnis dan transreligius. Dan ini, sebagai hasil Rinasascimento dan Aufklarung hendak diuniversalisasikannya. Oleh karena pendidikan dan informasi Barat dewada ini dominan di dunia, maka banyak pula pemuka-pemuka nir-Barat yang menganutnya.

Moral berubah menurut masa, yang sentral berubah lebih lambat dan jarang daripada yang perifer. Sebenarnya pada setiap pergantian generasi, moral berubah, tetapi baru agak mencolok sesudah dua generasi, yang merupakan satu gelombang panjang dalam siklus perubahan. Perubahan atau inovasi teknologi yang besar atau penting dapat mempengaruhi moral,

demikian pula malapetaka alam dan kepadatan penduduk. Moral membatasi ego dan id, agar hak orang lain dan hak kolektif tidak terganggu. Hak-hak moral biasanya lebih sukar dilindungi daripada hak-hak legal.

Dalam bertahan hidup, normaliter moralitas (sila) dapat dipertahankan, karena ia lebih menguntungkan daripada amoralitas dan immoralitas (dursila). Dalam suasana kritis dan kaotis justru amoralitas yang lebih menguntungkan. Demikian pula sesungguhnya dalam masyarakat yang patologis (sakit). Moralitas dipertahankan oleh nurani dan sanubari masyarakat, yang diwakili oleh alim-ulama (agamawan) dan berstari (scholars). Kalau mereka ini pun ikut terkontaminasi dan terkooptasi, maka kalangan hukum harus bekerja berat, hanya sayangnya mereka biasanya sudah lebih dulu terjerumus.

Agama, Hukum dan Etika

Semua agama besar mengajar yang baik dan mengancam dengan hukuman neraka, reinkarnasi dan sengsara. Agama-agama Yahudi-Kristen mengajarkan (Devarim dan Dasatitah), yang sebetulnya sudah mulai ada sejak zaman Mesir Kuna dan Kode Hammurabi. Dalam *Devarim* butir-butir awal mengan-

dung kaidah (ajaran-ajaran pokok), seperti keesaan Tuhan Pencipta, yang belakangan dan lebih banyak adalah larangan (membunuh, menipu, mencari, dan lain-lain). Dasatitah mengandung terutama larangan. Dasasila Buddha berlaku bagi bhikku, dan Pancasila (*Panch-sheel*) berlaku bagi yang awam dan mengandung larangan-larangan pula.

Hampir semua agama melarang membunuh, kecuali dalam hal-hal tertentu: kurban, membela agama, berbakti di jalan Tuhan, dan lain-lain. Ideologi mengambil banyak hal dari agama, misalnya boleh membunuh untuk membela ideologi, negara dan tanah air, kebenaran, serta jiwa seseorang, adanya indoktrinasi, booster, sitat pemimpin dan sahabat-sahabatnya, atribut suci, dan lain-lain untuk melestarikan ideologi. Monopoli membunuh secara legal berada di tangan pemerintah.

Dalam penganutan agama bermain pula faktor-faktor Timur-Barat, urban-rural, sosial ekonomi, adat dan tradisi, ekologis dan demografis serta waktu. Agama berevolusi dan dipengaruhi oleh tempat dan waktu, beradaptasi dengan perubahan dan perbedaan. Hukum dapat memperkuat moral, tetapi tidak segala pelanggaran moral dapat dikenakan sanksi hukum. Kalau

hukum tidak berfungsi (tidak diimplementasi dengan adil), maka moral dapat menderita.

Etika yang normatif dapat mempengaruhi moral, terutama etika terapan. Sanksi terhadap pelanggaran etika dilakukan oleh rekan, sejawat, perhimpunan profesional atau vokasional. Etika juga berubah dengan masa, lingkungan sosioteknis, paradigma dan pendidikan.

Pada saat ini di Indonesia tanda-tanda dan gejala-gejala disintegrasi terlihat dalam segala bidang tersebut di atas: ajaran agama, ideologi; hukum, etika dan moral. Oleh karena itu perbaikannya sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama, karena merasuki segala aspek kehidupan.

Disintegrasi Moral

Tanda dan gejala disintegrasi moral dapat kita lihat pada merosotnya wibawa agamawan, terkooptasinya mereka dalam politik yang penuh kompromi dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan, ritual lebih dipentingkan daripada ajaran pokok, meningkatnya hipokrisi, banyaknya sumpah yang diabaikan, dan fatwa pesanan.

Gejala yang sama juga dapat dilihat dari merosotnya kejujuran intelektual, manipulasi kebenaran ilmiah, dikesampingkan-

nya prinsip-prinsip ilmiah dan sikap ilmiah, ijazah dan derajat akademis lebih dipentingkan daripada isinya (*Haben* lebih penting daripada *Sein*), komersialisasi pendidikan, penjualan ijazah dan derajat, ketidakadilan dalam kebijakan ilmu pengetahuan, dan fatwa pesanan *ex cathedra*.

Di samping itu disintegrasi moral bangsa juga terlihat tidak terandalkannya hukum dan peradilan, mafia pengadilan, suap, disrupsi anyaman polisi - kejaksaan - pengacara - hakim, banyaknya pemetiesan kasus dan penerapan prinsip-prinsip oportunitas, rekayasa perkara, penghukuman yang tak bersalah dan pembebasan yang bersalah, siksa dan kesempatan lagi dari tahanan dan penjara, siksa dan aniaya untuk ekstraksi pengakuan, pengacauan asas presumsi tak bersalah dan presumsi bersalah, campur tangan non-judisial dalam perkara, penggelapan barang bukti, dan lain-lain.

Selanjutnya tanda tersebut tampak dan banyaknya penyimpangan di bidang ekonomi dan pemerintahan: korupsi, penggelembungan harga, pemungutan liar, penyimpangan pajak, nepotisme, ketidakadilan dan hipokrisi, hutang tak bekerja, pemeriksaan keuangan yang pro forma, bank yang kebanyakan tetapi lemah, konglomerat tebas-

bakar (berpindah), bagi hasil yang merugikan, birokrasi yang lamban dan tunggu perintah.

Tanda lain dari disintegrasi moral bangsa adalah dalam bidang politik-militer: seperti adanya pendekatan keamanan, rekayasa kerusuhan, rekayasa pemilu, perlindungan anggota korpus (*corpus*) walaupun salah, simoni (pembelian jabatan), vernalitas (terbelinya) pegawai negeri, nepotisme, korupsi, pegawai dan perwira berdagang, hipokrisi, rombongan pejabat (*entourage*) ke daerah atau ke luar negeri terlalu besar dengan sekuritas berlebihan, pusat melepaskan diri dari tanggungjawabnya terhadap daerah-daerah, keamanan dijadikan proyek "pembangunan".

Akhirnya gejala tersebut terlihat dari meluasnya ancaman narkotik, alkohol bermutu rendah, tembakau, perbudakan putih, pornografi lunak dan keras, skatologi dan skatografi, hedonisma materialistis, *infotainment* kelas bawah, dan pemujaan kekerasan oleh dan atas generasi masa depan bangsa.

Pengaruh terhadap Ketahanan Nasional

Krisis paradigmatik seperti diuraikan di atas menimbulkan dislokasi moral yang hebat, sehingga merupakan disintegrasi

moral, sebagai akibat proses yang telah berlangsung lama. Dampak robeknya jaringan moral menimpa ketahanan nasional, yang dipelajari dandibina dengan tekun, lama dan mahal, tetapi kempis seketika.

Ketahanan nasional mulai retak-retak oleh ketidakadilan pusat-daerah, ketidakadilan religius, serta ketidakadilan di kalangan swasta dan kalangan birokrasi. Lapisan tipis teratas menguasai harta milik terbesar dan hidup dalam enclave kemewahan dengan hedonisma Amerika. Juga terdapat ketidakadilan kultural dan edukasional. Pusat-pusat ilmu dan teknologi terkonsentrasi terutama pada poros Serpong-Jakarta - Bogor - Bandung - Sumedang, yang dalam jangka pendek menguntungkan penduduk sekitar, tetapi dalam jangka panjang merugikan mereka. Konsentrasi sekunder terdapat dalam segitiga Yogyakarta - Magelang - Semarang - Salatiga - Surakarta dan poros Surabaya - Malang.

Semuanya terlalu terpusat di Jabotabek, padahal negeri kita multikultural, multirasial, multilingual, dan arkielagik. Ketidakadilan terdapat dalam pengambilan keputusan kebijakan, pelaksanaan, penikmatan hasil dan pemikulan risiko. Kredibilitas pemerintah dan pemimpin meluncur ke bawah. Terpusatnya

uang dan harta di Jabotabek menimbulkan daya tarik urbanisasi yang kuat sekali, sehingga berkembanglah *megaslums* dan berkurangnya kohesi bangsa.

Krisis ekologis dengan pembakaran dan kebakaran hutan serta penggabutan lahan hutan merupakan krisis ekologis yang kurang diantisipasi, sehingga menambah parahnya krisis moneter dan ekonomi, politik dan militer. Separatisme daerah bermula dari separatisme pusat, dan gagalnya integrasi Timor-Timur "pendekatan militer" dan ketidakadilan ekonomis.]

Nilai-nilai Amerika

Sebagai negara yang terkuat dari sudut militer, politik, ekonomi, geografis dan demografis, serta terakhir dan terpenting, informasional, kebudayaan Amerika berdampak sangat besar di seluruh dunia dalam kontak budaya yang makin intensif. Tidak semua aspek kebudayaan Amerika baik untuk semua negara dan bangsa, tetapi karena negara itu kaya dan ekologi yang berbeda.

Beberapa nilai Amerika yang kurang tepat dan inadaptif bagi suatu negara yang sedang maju adalah:

1. hedonisma yang egoistis: orang hanya ingin hidup senang-nikmatnya pada hari

- ini dengan tidak memperhatikan kontinuitas budaya dan kehidupan yang baik di masa depan;
2. Penekanan terlalu besar pada stabilitas jangka pendek, bahkan stabilitas golongan, yang berakibat menentang perubahan dan melestarikan keadaan statis;
 3. Terlalu mendewakan kemajuan materislistis dan hiburan dangkal, serta melupakan budaya kualitatif;
 4. Eksploitasi lingkungan yang berlebihan untuk kesenangan hari ini; lingkungan dijadikan komoditas dan milik;
 5. Terlalu mementingkan hak milik pribadi dan hak-hak individu, sehingga sumber daya primer dimiliki perseorangan, dengan akibat kesenjangan multidimensional;
 6. Pemaksaan dan pemerataan pembatasan kelahiran dengan tidak memperhatikan angka kelahiran dan kematian, migrasi, serta pengendalian bahaya dan bencana di suatu daerah;
 7. Individualisma radikal yang mengabaikan interdependensi dan kesejahteraan kolektif;
 8. depersonalisasi: manusia dianggap suku mesin, dapat dipergantikan, sebagai komoditas yang dapat dikorbankan, kalau usang atau kelebihan;
 9. Keadilan sosial ekonomis diganti dengan ketahanan individual melalui kompetisi, dan mengabaikan kooperasi;
 10. pemusatan kekuasaan yang berlebihan, sehingga terdapat kesenjangan dalam partisipasi dan alokasi sumber daya;
 11. Kebijakan dan tindakan cenderung pragmatis dan reaktif, tambal-sulam untuk jangka pendek dan lebih tertuju pada pelenyapan gejala, bukan sebabnya;
 12. Pendidikan dan ilmu pengetahuan hanya menjadi embel-embel pasar, bukan sebagai alat adaptasi untuk bertahan hidup dan menciptakan masa depan manusia yang lebih baik.
- Sangat sulit membebaskan diri dari nilai-nilai Amerika yang dominan tersebut, karena hegemoni atau imperialisme informasi yang mempengaruhi gaya hidup, wawasan hidup, daya pikat hutang dan kemewahan, teknik MacDonaldisasi dan Disneyisasi yang bergabung sebagai *nutritainment* yang melengahkan. Bangsa-bangsa yang sedang berkembang terpaksa hidup di luar kemampuannya dan mencipta dunia khayali yang tidak tegak di atas realitas. Inilah yang mengerat-ngerat ketahanan nasional.

Jalan Keluar

Adakah jalan keluar dari labirin kekacau-kacauan moral yang kita derita sekarang? Pasti ada, hanya sulit sekali dan memerlukan ketekunan, kesungguhan, ketangguhan, dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin sejati, yang pikiran, bicara dan kerjanya senada, yang menafikan dirinya untuk kepentingan bangsa, yang berwawasan luas dalam ruang dan waktu, yang jantungnya berdenyut bersama jantung rakyat banyak, yang merasakan irama dinamika dunia, tetapi mempunyai cita-cita yang mampu menyongsong, memilih dan mencipta masa depan bangsa. Suatu bangsa memerlukan baik *men of ideas dan men of action, the thinkers dan the doers*, manusia refleksi dan manusia operasi, pemimpi-pemimpi yang berpikir virtual dan pemimpin-pemimpin yang membuat impian menjadi kenyataan.

Pada peralihan gelombang panjang budaya sekitar akhir abad ini, kita harus dapat memanfaatkan kelonggaran - kelonggaran yang terdapat dalam sistem, peleburan sistem usang yang solid dan dinamis yang sedang berkecamuk untuk kepentingan kita dalam mereformasi keadaan sekarang menjadi masa depan yang lebih diharapkan.

Pada tempat pertama kita dudukkan reformasi mental dan moral. Kekayaan, kepandaian, kekuatan dan kealiman ritualistis yang hipokritis tak ada gunanya tanpa moralitas yang kuat, konsisten dan operasional. Semua kesusahan dan kiris yang kita alami sekarang berdiri di atas moralitas yang rapuh dan dangkal. Pendidikan budi pekerti yang formal, dan lebih-lebih yang informal, tak dapat diabaikan pentingnya. *Interface* ilmu dan agama harus dimanfaatkan.

Sesudah lebih 50 tahun merdeka kita harus dapat memusatkan kesetiaan kita pada Indonesia. Perspektif kita harus meliputi seluruh bangsa dan tanah air. Pembangunan harus berorientasikan manusia dan bersifat multisentral. Lebih mudah kalau ibu kota negara terletak di tengah-tengah, misalnya Kalimantan Selatan. Ibu kota adalah pusat pemerintahan, eksekutif, judikatif dan legislatif, tidak perlu terpisah-pisah seperti Afrika Selatan. Tetapi ibu kota tidak perlu menjadi pusat ekonomi, budaya dan pendidikan sekaligus.

Agama dan asas negara lebih baik dihayati dan tidak terlalu sering disebut-sebut daripada dihafal-hafal tetapi tidak dilaksanakan sehari-hari. Insentif harus bersifat adaptif, menguntungkan ketahanan nasional dan kemajuan bangsa, jangan

bersifat inadaptif, misalnya yang tidak jujur yang maju, berkuasa dan disanjung-puja. Hukum harus konsisten dilaksanakan, jangan tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Dan yang terakhir, tetapi bukan tidak

penting, adalah pendidikan harus mencipta manusia yang autonom, yang berani memutuskan, memilih, berpikir merdeka, membela kebenaran, kreatif dan bertanggung jawab sebagai individu.